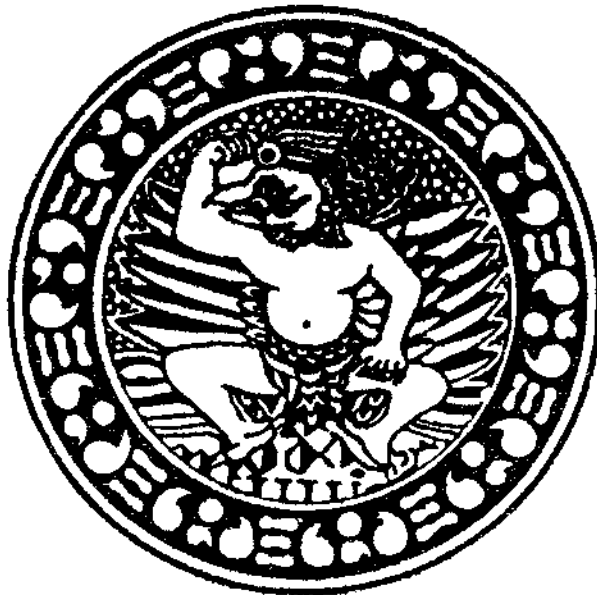


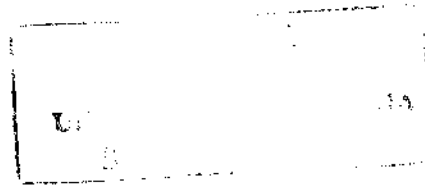
SKRIPSI

ZAM-ZAM AMIRULLAH

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI OBYEK HAK TANGGUNGAN



KK
No 245663
Rini
P



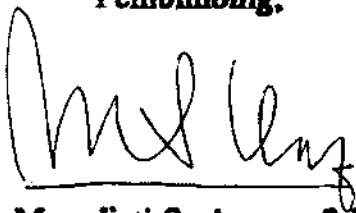
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1998

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM
PELAKSANAAN EKSEKUSI OBYEK HAK TANGGUNGAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pembimbing,



Hj. Moerdiati Soebagyo, S.H., MS.

NIP. 130 287 031

Penyusun,



Zam-zam Amirullah

NIM. 039413956

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1998**

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan eksekusi Hak Tanggungan menurut Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) yaitu Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 bila dibandingkan dengan pengaturan eksekusi menurut ketentuan Hipotik dinilai lebih baik dan lebih menjamin kepastian hukum terhadap kedudukan yang diutamakan dari kreditur pemegang Hak Tanggungan. Hal ini dapat dilihat antara lain pada pengaturan mengenai :
 - Kewenangan pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan didasarkan atas hak bukan didasarkan atas pemberian kuasa sehingga hal ini memberikan konsekuensi yuridis yang berbeda (lebih baik).
 - Pengganti grose akta Hipotik yaitu sertifikat Hak Tanggungan yang merupakan tanda bukti adanya hak Tanggungan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 14 UUHT menghilangkan kerancuan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Hipotik
 - Adanya pengaturan mengenai cara penjualan obyek Hak Tanggungan pada saat eksekusinya secara dibawah tangan yang sebelumnya pada ketentuan Hipotik hal tersebut belum diatur.
2. Masalah yang sering terjadi pada masa pembebanan Hipotik yang merupakan hambatan dalam pelaksanaan eksekusi Hipotik ternyata belum

semuanya diantisipasi oleh Undang-undang Hak Tanggungan. Hal ini dapat dilihat pada masalah peletakan sita diatas obyek Hipotik (Hak Tanggungan) oleh pengadilan tidak disinggung sama sekali dalam pasal-pasal dari Undang-undang Hak Tanggungan padahal pengaturan masalah sita ini penting untuk menjamin kepastian hukum sekaligus perlindungan hukum bagi kedudukan yang diutamakan kreditor pemegang Hak Tanggungan.

B. Saran

1. Untuk memberikan jaminan kepastian hukum sekaligus juga perlindungan hukum, materi dari peraturan pelaksana-peraturan pelaksana Undang-undang Hak Tanggungan nantinya harus berdasarkan atau berpedoman pada Undang-undang Hak Tanggungan, dalam arti peraturan pelaksana-peraturan pelaksana tersebut materinya tidak bertentangan dengan Undang-undang pokoknya yaitu Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 (Undang-undang Hak Tanggungan).
2. Termasuk juga penegasan mengenai masalah sita oleh pengadilan atas obyek Hak Tanggungan ke dalam suatu peraturan diperlukan agar tidak menimbulkan masalah sebagaimana yang terjadi pada masa pembebanan Hipotik.